



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN RISET, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI 3. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI 4. Dirjen Anggaran Kemenkeu RI 5. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI 6. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN RB RI
Hari/Tanggal	: Rabu, 23 Juni 2021
Pukul	: 09.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI Virtual (menggunakan media Zoom)
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Tindak Lanjut hasil RDP tanggal 30 Maret 2021 (Penjelasan lebih lanjut penyelesaian terhadap 34.317 sisa guru PPPK untuk mendapatkan penggajian) 2. Informasi terkini mengenai rekrutmen 1 juta PPPK 3. Lain-lain
Hadir Komisi X DPR RI	: 38 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pembicara	: 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian- BKN, Suharmen, S.Kom., M.Si;

2. Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI – Prof. Nunuk Suryani, M.Pd.;
3. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI - Drs. Komaedi, M.Si;
4. Dirjen Anggaran Kemenkeu RI – Isa Rachmatarwata
5. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu RI – Purwanto
6. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkeu RI – Didik Kusnaeni
7. Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu RI – Adriyanto
8. Kepala SubDirektorat Dana Alokasi Umum – Aditya Nuryuslam
9. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM KemenPAN-RB RI – Dr. Ir. Katmoko Ari Sambodo

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 09.15 WIB oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM. (Wakil ketua Komisi X DPR RI), sesuai pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari BKN RI, Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI dan KemenPAN-RB RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

- A. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek RI, Kemenkeu RI, Kemendagri RI, KemenPAN-RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara RI, masing-masing menyampaikan perkembangan terhadap 34.317 guru lulus PPPK untuk mendapatkan SK dan penggajiannya, sebagai berikut:
 1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN RI menyampaikan data perkembangan Guru PPPK sebagai berikut:
 - a. Guru lulus *Passing Grade* sejumlah 34.954 orang.
 - b. Formasi Guru PPPK sejumlah 34.317 orang.
 - c. Guru PPPK yang telah mendapatkan SK dan Nomor Induk (NI) PPPK sejumlah 33.987 orang.

- d. Dari seluruh tahapan seleksi ASN Guru THK-II Tahun 2020, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN RI mencatat sisa GTHK-II sejumlah 121.954 orang.
2. Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbudristek RI menyampaikan bahwa berdasarkan data BKN per Maret 2021, guru yang lulus PPPK Tahun 2019 dan telah mendapatkan SK sebanyak 33.881 orang. Dari Guru PPPK sebanyak 33.881 orang tersebut, tercatat berdasarkan rekognisi data guru ASN – PPPK sebagai berikut:
- terdaftar dalam dapodik 33.459 orang
 - tidak terdaftar dapodik 422 orang
 - bersertifikasi telah valid 4.409 orang
 - bersertifikasi tidak valid 588 orang
 - belum bersertifikasi 28.462 orang
- Dari seluruh tahapan seleksi ASN Guru THK-II Tahun 2020, Ditjen GTK Kemendikbudristek RI mencatat sisa GTHK-II sejumlah 115.791 orang.

Terkait perkembangan informasi rekrutman 1 juta guru PPPK, Dirjen GTK Kemendikbudristek RI menyampaikan sebagai berikut:

- Kebutuhan guru PPPK pada semua jenjang sejumlah 1.002.616 orang
- Estimasi formasi tahun 2021 sejumlah 516.972 orang dan kebutuhan pada tahun 2022 sejumlah 485.644 orang.
- Alokasi gaji untuk tahun 2021 sebesar 18,4 triliun dan pada tahun 2022 sebesar 10,8 triliun sehingga total kebutuhan gaji guru PPPK sebesar 29,2 triliun. Rincian kebutuhan guru PPPK dan anggarannya sebagai berikut:

No	Tingkatan	Kebutuhan	Estimasi Formasi 2021	Kebutuhan 2022	Alokasi Gaji Formasi Tahun 2021	Alokasi Gaji Formasi Tahun 2022	Total Kebutuhan Gaji PPPK Tahun 2022
1	TK	2.767	1.923	844	68.454.954.000	18.777.945.000	87.232.899.000
2	SD-SMP	823.383	397.246	426.137	14.141.163.108.000	9.481.015.578.750	23.622.178.686.750
3	SLB	4.537	3.357	1.180	119.502.486.000	26.253.525.000	145.756.011.000
4	SMA-SMK	171.929	114.446	57.483	4.074.048.708.000	1.278.924.896.250	5.352.973.604.250
Total		1.002.616	516.972	485.644	18.403.169.256.000	10.804.971.945.000	29.208.141.201.000

3. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI menyampaikan upaya percepatan guru PPPK, sebagai berikut:
- Telah mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk gaji dan tunjangan PPPK dalam APBD TA 2021 melalui surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 910/2507/Keuda Tanggal 7 April 2021.
 - Alokasi tersebut bersumber dari DAU sebagaimana penjelasan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/2021 tanggal 31 Maret 2021 bahwa Alokasi Dasar perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2021 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) TA 2021 telah memperhitungkan jumlah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah, termasuk didalamnya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.

c. Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2021 agar segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja pegawai dimaksud dalam APBD TA 2021 sebagai berikut:

- 1) melakukan pergeseran anggaran untuk menambahkan alokasi belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pergeseran anggaran terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan penjabaran APBD TA 2021 serta diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2021.

4. Dirjen Anggaran Kemenkeu RI menyampaikan:

a. Kebijakan Dana Alokasi Umum TA 2021 adalah

- 1) menyempurnakan Alokasi Dasar pada formula DAU untuk mendukung kebijakan yang mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM dengan mempertimbangkan formasi PNS Daerah dan PPPK.
- 2) pemanfaatan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di daerah, termasuk perbaikan infrastruktur dan memperkuat pembangunan SDM di bidang pendidikan antara lain untuk pembayaran gaji guru non PNSD sebesar Rp.19,4 triliun sesuai dengan realisasi penerimaan dan pengangkatan guru non PNSD.
- 3) penyaluran secara asimetris berbasis kinerja untuk mendukung optimalisasi penggunaan DAU untuk pencapaian *output* layanan.

b. Pada TA 2020 telah dialokasikan pagu sebesar 4.260,55 miliar yang bertujuan memberikan bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah dalam rangka pengangkatan PPPK (tidak termasuk formasi PPPK di DKI Jakarta). Pengalokasian ini menjadi temuan BPK mengingat belum adanya regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengangkatan Guru ASN-PPPK dan keterlambatan pengangkatan PPPK di daerah.

c. Untuk TA 2021 kebutuhan guru PPPK berdasarkan Surat Deputi Bidang SDM Aparatur, KemenPANRB Nomor B/11/SM.07.00/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Penyampaian Rencana Formasi CPNS Daerah dan PPPK Guru Tahun 2021 dan Surat Mendikbud Nomor 62791/MPK.A/KU/2020 tanggal 17 Juli 2020 mengenai

kebutuhan guru non-PNS tahun 2021, telah disiapkan alokasi anggaran sebesar Rp.19.396.107.828.000,- (*sembilan belas triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu* rupiah) untuk asumsi kebutuhan guru PPPK Tahun 2021 sejumlah 1.002.616 guru PPPK, dengan rincian:

Tingkatan	Jumlah
SD	601.189
SMP	229.498
SMA	83.718
SMK	88.211
Total	1.002.616

5. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM KemenPAN-RB RI menyampaikan data perkembangan Guru PPPK sebagai berikut:
 - a. Guru lulus *Passing Grade* sejumlah 34.954 orang
 - b. Formasi Guru PPPK sejumlah 34.317 orang

Terkait perkembangan informasi rekrutman 1 juta guru PPPK, Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM KemenPAN-RB RI menyampaikan bahwa estimasi formasi guru PPPK Tahun 2021 sejumlah 525.667 terdiri dari 128.631 diusulkan dari 34 provinsi dan 397.036 diusulkan dari 487 kabupaten/kota.

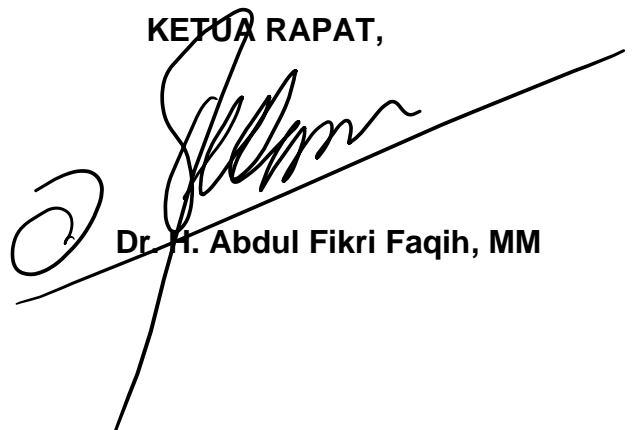
- B. Terhadap paparan dan penjelasan dari Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, Kemen PAN-RB RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Komisi X DPR RI memberikan catatan dan masukan sebagai berikut:
 1. Mengenai hasil seleksi Guru PPPK tahun 2019, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, dan BKN RI untuk menekankan kepada pemerintah daerah yang kurang persyaratan administrasi usulan atau daerah yang belum menyampaikan usulan formasi, namun telah lulus *Passing Grade* sejumlah 637 guru PPPK dari 34.954 guru, untuk segera melengkapi persyaratan dan mengusulkan formasinya.
 2. Mendorong Kemenkeu RI untuk menerbitkan surat edaran kepada Pemerintah Daerah dan menyampaikan skema anggaran secara komprehensif, khususnya mengenai alokasi anggaran sebesar Rp19.396.107.828.000,- (*sembilan belas triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu* rupiah) mengingat sampai saat ini (per tanggal 23 Juni 2021) belum terealisasi, meskipun anggaran tersebut sudah dicairkan per bulan kepada pemda melalui skema anggaran DAU. Mengenai surat edaran tersebut, agar disampaikan paling lambat 14 hari ke depan.

3. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan K/L terkait penyelesaian hasil seleksi Guru PPPK menjadi ASN tahun 2019 dan permasalahan seleksi 1 juta PPPK tahun 2021.
4. Mendesak Kemendikbudristek RI dan Kemendagri RI melakukan komunikasi kembali dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan guru PPPK melalui APBD.
5. Mendorong Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, KemenPAN-RB RI dan BKN RI menerbitkan regulasi bersama untuk memastikan ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan bagi guru PPPK tidak hanya tahun 2021 atau 2022, namun ketersediaannya disesuaikan dengan masa kerja berdasarkan SK PPPK.
6. Mendorong Kemendikbudristek RI, KemenPAN-RB RI dan BKN RI untuk meningkatkan koordinasi guna memastikan data (angka-angka) terkait adanya perbedaan data yang masuk mengenai guru THK sesuai kebutuhan formasi 1.002.616 guru PPPK dan sisa GTHK-II.
7. Mendesak Pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran untuk guru yang lulus seleksi PPPK dianggarkan setiap tahun melalui APBN.
8. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI mengkoordinasikan dengan K/L terkait (Kemendagri RI, Kemenkeu RI, KemenPAN-RB RI dan BKN RI) untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang belum terjawab, termasuk perkembangan (*update*) data terkait seleksi PPPK tahun 2019 dan seleksi 1 juta PPPK tahun 2021, paling lambat tanggal 12 Juli 2021. Data dan jawaban tertulis akan digunakan sebagai bahan reses DPR RI.

II. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.50 WIB

KETUA RAPAT,



Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM